



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAKTY SUPRABOWO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **726837**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 875.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 735.000.000
2. Tanah Seluas 1099 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 133.300.000

1. MOBIL, DAIHATSU F700RG-TX MT/ TERIOS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA D1802N26L2A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
3. MOTOR, HONDA AFP12W21COB M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA C100 Tahun 1996, WARISAN Rp. 1.300.000
5. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 40.500.000

D. SURAT BERTARAF

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 55.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.103.800.000

III. HUTANG

Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.103.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.